

**“PERAN AUDIT INTERNAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE PADA “BANK SUMUT SYARIAH
PRIORITAS BRIGJEN KATAMSO MEDAN”**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh:

ZULFA MAULIDINA

NIM 26133078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2017

ABSTRAK

Skripsi berjudul **“Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Pada Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso”** atas nama Zulfa Maulidina. Di bawah bimbingan Pembimbing I Ibu **Dr. Chuzaimah Batubara, MA** dan Pembimbing II Bapak **Muhammad Arif, MA**.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa keuangan. Hal yang paling memegang pengaruh yang sangat penting dalam bisnis di bidang jasa adalah kepercayaan. Dalam dunia perbankan sangat penting untuk menjaga rasa kepercayaan dari nasabah. Dalam menjaga kepercayaan tersebut, pihak perbankan memberikan berbagai macam kemudahan dan berbagai macam produk yang menarik bagi nasabah. Baik dalam bentuk penghimpunan maupun penyaluran dana. Selain dalam memberikan berbagai kemudahan dan produk, para nasabah juga akan memperhatikan operasional yang baik dari suatu bank. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso. Informan penelitian berjumlah 3 orang yang terdiri dari wakil Pimpinan Bank Sumut, pihak Audit Internal, dan pihak SDM. Jenis sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pengaruhnya Audit internal terhadap Good Corporate Governance di bank Sumut Syariah, yaitu : dengan adanya prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang mempengaruhi pentingnya Audit Internal.

Kata kunci : Pelaksanaan Good Corporate Governance, Pentingnya Good Corporate Governance, Manfaat Good Corporate Governance, Laporan Audit.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayahnya dan petunjuk yang tiada hentinya. Shalawat teriring salam tak lupa pula peneliti hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah membawa cahaya Islam ke dunia ini dan juga ilmu pengetahuan kepada ummatnya.

Skripsi ini berjudul **“PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SUMUT SYARIAH BRIGJEN KATAMSO”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya, dan diharapkan juga bermanfaat bagi para pembaca mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Selama penyusunan skripsi, penulis telah banyak mendapat bimbingan, pengarahan, bantuan dan do'a dari berbagai pihak terutama ayah, mama, dan adik – adikku tersayang. Untuk itu, dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah memberikan bantuan terutama:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag sebagai rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr.Marliyah, MA, sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Dr. Yenni Samri J Nst, MA, sebagai Sekretaris.

5. Bapak Dr. Bambang Irawan, M. Ag, selaku dosen pembimbing akademik saya yang memberikan arahan dan motivasinya kepada saya sehingga saya dapat menjalani kuliah ini sampai semester akhir.
6. Ibu Dr. Chuzaimah Batubara, MA selaku dosen pembimbing skripsi I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi pengarahan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Arif, MA selaku dosen pembimbing skripsi II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi pengarahan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh pegawai Bank Sumut Syariah Brigjen Katamsa Medan.
9. Teristimewa kepada orang yang paling penulis cintai yang selalu memberikan dukungan melalui materi dan moril kepada ayah tercinta Abdullah Syaha dan mama tercinta Dewi Anggraini dan Astuti Simamora. Serta, Adik-adik saya Annisa Faradila, Dini Pratiwi dan Muhammad Imam Abdillah.
10. Terima Kasih kepada teman – teman seperjuangan saya, EPS-B stambuk 2013 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terkhusus kepada teman – teman saya dari pertama OPAK dan menjadi sahabat seperjuangan saya yaitu: Hanifah Waffa dan Siti Zubaidah Lubis. Serta, kepada Dita Adelia dan Lely Hayati yang telah banyak membantu penulis dalam menyemangati untuk penulisan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman yang paling spesial yaitu Zulfiqri Elmi Rizki yang selalu mendukung saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan KKN dan magang, yang telah mengisi hari-hari dalam menyelesaikan skripsi ini dengan canda dan tawa, serta dukungan yang luar biasa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun, sangat penulis harapkan dari pembaca, terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan, penulis hanya dapat berdoa semoga semua kebaikan yang telah diberikan akan dibalas Allah SWT, dengan lebih baik. Semoga amal yang telah kita lakukan dijadikan

amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat.

akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 24 Agustus 2017

ZULFA MAULIDINA

NIM: 26133078

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	
PENGESAHAN.....	
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat	6
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	7
A. Audit Internal	7
1. Pengertian Audit Internal	7
2. Fungsi Audit Internal dalam penerapan GCG di Perbankan.....	9
3. Auditing dan Kesehatan Bank.....	11
4. Audit Internal dalam Perspektif Islam	16
5. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Pada Bank Umum	21
6. Peran Audit Internal	22
7. Proses Melaksanakan Audit Internal.....	23
B. GOOD CORPORATE GOVERNANCE.....	23
1. Definisi GOOD CORPORATE GOVERNANCE.....	23
2. GOOD CORPORATE GOVERNANCE dalam Perspektif Islam.....	26

3. Pelaksanaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE	
Pada Bank Umum	30
4. Pelaksanaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE	
Pada Perbankan Syariah	31
5. GOOD CORPORATE GOVERNANCE dalam	
Perbankan Indonesia	34
6. Dasar Hukum dan Relevansi Tata Kelola yang Sehat	
(Good Corporate Governance) Bagi Bank Syariah.....	35
7. Tujuan Penerapan Tata Kelola yang Baik	
(Good corporate Governance) Bagi Bank Syariah.....	36
8. Prinsi-prinsip Good Corporate Governance	
bagi Perbankan Syariah.....	36
C. Kajian Terdahulu.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PNELITIAN	43
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	43
1. Sejarah PT. Bank Sumut.....	43
2. Struktur Organisasi	44
3. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan	45
4. Fungsi Bank Sumut	45
5. Sumber Daya	46
6. Unit Usaha Syariah Bank Sumut	46
7. Prestasi dan Reputasi Unit Usaha Syariah Bank Sumut.....	47

8. Logo Perusahaan.....	48
9. Ruang Lingkup Bidang Usaha.....	49
10. Lokasi Bank Sumut Syariah KC. Medan.....	54
11. Daerah pemasaran Bank Sumut Cabang Syariah Medan	54
B. Penerapan GCG di Bank Sumut Syariah	54
C. Analisis Temuan.....	57
 BAB V PENUTUP	 60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62
 DAFTAR PUSTAKA	 63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Laju pertumbuhan asset bank sumut tahun 2009 – 2017	43
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, bank membutuhkan pihak auditor untuk mengawasi dan mengevaluasi setiap kegiatan operasionalnya.

Audit merupakan proses sistematis mengenai mendapatkan dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berkaitan dengan penilaian mengenai berbagai kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penilaian-penilaian tersebut dan membentuk kriteria serta menyampaikan hasilnya ke para pengguna yang berkepentingan.

Lembaga audit internal mendefinisikan sebagai fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk mempelajari dan mengevaluasi berbagai aktivitasnya sebagai layanan bagi perusahaan. Para audit internal melakukan berbagai jenis aktivitas atas nama perusahaan, termasuk melakukan audit keuangan, mempelajari ketaatan suatu operasi terhadap kebijakan perusahaan, mengkaji ketaatan perusahaan terhadap kewajiban hukumnya.¹

Menurut, A. Abdurrachman dalam *Ensklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* menjelaskan bahwa, “ Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai

¹ Hall Singleton, *Information Technology Auditing and Assurance*, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), h.3

tempat penyimpanan benda – benda berharga, membiayai usaha perusahaan – perusahaan.²

Berdasarkan kepemilikannya bank terbagi 2, yaitu : Bank milik negara, yang dimana saham mayoritasnya dimiliki oleh pemerintah. Serta bank swasta, dimana saham mayoritasnya dimiliki oleh pihak non pemerintah. Walaupun kegiatan dari perbankan tersebut menghimpun dan menyalurkan dana, namun tidak dipungkiri dalam setiap kegiatan yang dilakukannya tidak terlepas dalam upaya untuk memperoleh keuntungan.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa keuangan. Hal yang paling memegang pengaruh yang sangat penting dalam bisnis di bidang jasa adalah kepercayaan. Dalam dunia perbankan sangat penting untuk menjaga rasa kepercayaan dari nasabah. Dalam menjaga kepercayaan tersebut , pihak perbankan memberikan berbagai macam kemudahan dan berbagai macam produk yang menarik bagi nasabah. Baik dalam bentuk penghimpunan maupun penyaluran dana. Selain dalam memberikan berbagai kemudahan dan produk, para nasabah juga akan memperhatikan operasional yang baik dari suatu bank.

Bank Sumut juga telah beberapa kali menyampaikan laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pertama kali tahun 2007 yang dikirimkan secara terpisah dari laporan tahunan bank Sumut yaitu kepada para pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pemeringkat di Indonesia, Asosiasi bank-bank Indonesia, 2 lembaga penelitian bidang ekonomi dan keuangan serta 2 majalah ekonomi dan keuangan dan menampilkan laporan.

Selain itu, dalam hal transparansi penyampaian laporan informasi kinerja keuangan, Bank Sumut telah menyajikan informasi kinerja keuangan mengenai kegiatan operasional bank yang secara berkala setiap triwulan dan disampaikan kepada stakeholders melalui surat kabar yang cukup informatif, maupun dalam

² Thomas Suyatno, et.al., *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta : Gramedia, 2007), h.1

buku Laporan Tahunan (Annual Report) secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pencapaian tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dengan membentuk struktur organisasi yang menggambarkan garis pertanggung jawaban yang jelas, dengan unsur utama pelaksanaan tata kelola perusahaan yakni Dewan Komisaris Dan Direksi. Struktur Organisasi ini nantinya akan lebih baik menekankan pada aspek pengawasan, kepatuhan, pelayanan, pemasaran, efektivitas/efisiensi melalui penerapan tata kelola yang baik, Manajemen Risiko, Risk Culture, dan Corporate Culture dengan berorientasi kepada pelaksanaan core business utama Bank Sumut sebagai lembaga professional penghimpun dan penyalur dana

Dalam mewujudkan operasional yang baik, di perlukan pengawasan yang dilakukan oleh pihak audit internal dalam kegiatan operasional Perbankan. Program audit internal ini harus berlanjut, artinya harus dilakukan secara terus-menerus. Pada dasarnya audit internal meliputi dua pola pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pasif melalui pemantauan laporan-laporan yang ada dan pemeriksaan aktif melalui penyelenggaraan kegiatan audit ditempat pada bagian- bagian tertentu dari bank tersebut.³ Dalam mewujudkan operasional yang baik , diperlukan sistem tatakelola yang baik (Good Corporate Governance) yang dalam pelaksanaannya selalu diawasi oleh pihak auditor internal perbankan.

Sistem tatakelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip – prinsip tatakelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip – prinsip yang berlaku secara universal ini di harapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaaat kepada para

³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang : Azkia Publisher, 2009). h. 138

stakeholdernya. Prinsip – prinsip tersebut meliputi *accountability, Responsibility, Independency, Fairness, dan Transparency*.⁴ .

Dalam prakteknya prinsip – prinsip tatakelola perusahaan yang baik ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan harus membangun sistem dan pedoman tatakelola perusahaan yang akan dikembangkannya. Demikian juga dengan para karyawan, mereka perlu memahami dan diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip – prinsip tatakelola yang baik yang akan dijalankan perusahaan.⁵

Dalam penerapan Good Corporate Governance di suatu perusahaan, akan selalu berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Seperti halnya pada Bank Sumatera Utara Syariah KC Brigjen Katamso Medan. Pada 2004 Bank Sumatera Utara Syariah telah berdiri dan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya memiliki visi untuk *menjadi bank andalan bagi masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat*. Serta memiliki misi untuk *mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance (kepatuhan)*.

Akan tetapi, dalam penerapan Good Corporate Governance di bank Sumut Syariah masih kalah dari beberapa BUMD lainnya, hal ini dapat dilihat dari daftar perbankan dengan Good Corporate Governance pada tahun 2015 dengan kategori Sangat Baik dan Baik, yang dikeluarkan oleh majalah Economic Review. Berikut ini adalah daftar bank dengan kategori Good Corporate Governance sangat “baik”, yaitu:

1. Bank Tabungan Negara, tbk (BTN);

⁴ Alam S, *Ekonomi* ,(Jakarta : Esis, 2006) . h. 189

⁵ <https://businessenvironment.wordpress.com/2007/04/30/membangun-tatakelola-perusahaan-menurut-prinsip-prinsip-Good-Corporate-Governance/> diakses pada tanggal 12 Mei 2017

2. Bank Mandiri (Persero), tbk;
3. Bank OCBC NISP, tbk;
4. Bank Rakyat Indonesia (Persero), tbk (BRI);
5. Bank Negara Indonesia (Persero), tbk (BNI);
6. Bank DKI;
7. Bank Permata, tbk;
8. Bank BCA, tbk;
9. Bank Ekonomi Raharja, tbk;

Berikut ini adalah daftar bank dengan kategori Good Corporate Governance “baik”, yaitu:

1. Bank Artha Graha Internasional, tbk;
2. Bank BJB, tbk;
3. Bank Mayora;
4. PT. Bank Sahabat Sampoerna;

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa bank Sumut Syariah masih kalah dari Bank lainnya dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance yang baik.

Corporate Governance diartikan sebagai proses dan struktur yang digunakan oleh BUMN maupun BUMS untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai etika.⁶

Pada Bank Sumut Syariah, pengawasan internal dilakukan oleh audit internal dimana pengendalian internal dalam struktur organisasi perusahaan dalam mematuhi kebijakan prosedur bank atau perusahaan, dimana audit internal dapat berjalan dengan baik dan memiliki eksistensi nilai dan rating yang cukup bagus.

⁶ Bambang Subroto SR, *Corporate Governance Or Good Corruption Governance*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2005), h.2

Dalam penelitian ini saya ingin tahu sejauh mana audit internal dapat berfungsi dan berperan penting dalam mewujudkan Good Corporate Governance yang dapat memperoleh kewajiban dan kebijakan dalam mengaudit data suatu bank atau perusahaan.

Dalam penelitian ini saya ingin mengkaji seberapa besar audit internal dapat bermanfaat bagi bank dan perusahaan lain dan seberapa penting audit internal dalam mewujudkan Good Corporate Governance. Dari uraian diatas penulis bermaksud melakukan penelitian judul “ **PERAN AUDIT INTERNAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**”. Studi kasus “**BANK SUMUT SYARIAH BRIGJEN KATAMSO MEDAN**”.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Audit Internal dalam Good Corporate Governance dengan mengambil studi kasus di Bank Sumut Syariah. Dalam penelitian tersebut yang menjadi masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Good Corporate Governance pada BANK SUMUT SYARIAH brigjen katamso Medan ?
2. Bagaimana peran audit internal dalam upaya mewujudkan Good Corporate Governance pada BANK SUMUT SYARIAH brigjen katamso Medan ?
3. Bagaimana audit internal dapat memberi manfaat bagi Good Corporate Governance pada BANK SUMUT SYARIAH brigjen katamso Medan ?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Good Corporate Governance pada BANK SUMUT SYARIAH brigjen katamso Medan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran audit internal dalam upaya mewujudkan Good Corporate Governance pada BANK SUMUT SYARIAH brigjen katamso Medan.

- c. Untuk mengetahui seberapa pentingnya audit internal dapat memberi manfaat bagi Good Corporate Governance pada BANK SUMUT SYARIAH brigjen katamso Medan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi perusahaan
Diharapkan mampu memberikan kinerja terbaik dalam melakukan pelaksanaan perusahaan Good Corporate Governance BANK SUMUT SYARIAH Medan.
- b. Bagi penulis
Hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu dan wawasan mengenai audit internal Good Corporate Governance BANK SUMUT SYARIAH Medan.
- c. Bagi auditor
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan untuk melakukan audit internal dalam mewujudkan Good Corporate Governance BANK SUMUT SYARIAH Medan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Audit Internal

1. Pengertian Audit Internal

Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntan public sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.⁷

Secara terminologis istilah audit berasal dari Bahasa Latin *'Audire'* yang berarti 'mendengar', pada zaman dahulu apabila seorang pemilik organisasi usaha merasa ada sesuatu kesalahan/ penyalahgunaan, maka ia mendengar kesaksian orang tertentu. Pada zaman itu apabila pemilik suatu badan usaha mencurigai adanya kecurangan, mereka akan menunjuk orang tertentu untuk memeriksa rekening/ akun perusahaan. Auditor yang ditunjuk tersebut 'mendengar' kemudian "didengar" pernyataan pendapatnya mengenai kebenaran catatan akun perusahaan oleh pihak – pihak berkepentingan.⁸

Audit adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independent dan kompeten, untuk menentukan apakah informasi yang disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Menurut seorang ahli sejarah akuntansi, dikatakan bahwa, asal usul audit dimulai lebih awal dibandingkan dengan asal usul akuntansi. Ketika kemajuan peradaban membawa pada kebutuhan akan adanya orang yang dalam batas tertentu dipercaya untuk

⁷ Sukrisno Agoes, *Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Ed 4*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012). h. 1

⁸ Sanyoto Gondodiyoto, *Audit Sistem Informasi : Pendekatan CobIT*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2007), h.28

mengelola harta milik orang lain, maka dipandang patut untuk melakukan pengecekan atas kesetiaan orang tersebut, sehingga semuanya akan menjadi jelas.⁹

Audit internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan baik audit keuangan maupun operasional. Peran audit semakin meningkat secara tajam dalam dekade terakhir, terutama karena peningkatan ukuran dan kompleksitas banyak perusahaan. Karena auditor internal menghabiskan waktunya untuk satu perusahaan, pengetahuan mereka mengenai operasi dan struktur pengendalian internal perusahaan lebih besar dari pada pengetahuan auditor eksternal.

Laporan hasil pemeriksaan auditor ekstern independen terhadap laporan keuangan perusahaan bermanfaat dalam menerangi *informasion risk* yang dihadapi para *stockholder* dan *stakeholder* mengenai laporan keuangan perusahaan. Di lingkungan internal perusahaan, sebenarnya *top management* juga menghadapi *information risk* bahwa laporan – laporan para manajer di bawahnya ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bahkan tiadak hanya itu, manajemen mungkin menghadapi resiko yang lebih luas, misalnya resiko bahwa perusahaan tidak dikelola dengan baik, atau kinerja perusahaan di bawah standar, adanya kesalahan/ penyalahgunaan di organisasi, risiko bahwa apa yang dikerjakan oleh anggota organisasi ternyata tidak sesuai dengan kebijakan manajemen, terjadi penyimpangan atau tidak mengkikuti aturan yang berlaku dan sebagainya.

Audit yang dilakukan tidak terbatas pada aspek – aspek akuntansi/ keuangan perusahaan saja, melainkan sudah mencakup kegiatan operasional organisasi. Kini audit telah berkembang dalam berbagai tujuan dan jenis audit . Selain audit laporan keuangan, diperlukan audit keuangan yang lebih mendetil terhadap potensi keuangan perusahaan (misalnya dalam proses pemberian pinjaman bank, atau rencana merger, atau perusahaan yang akan di jual), disebut *special audit*.

⁹ Sukrisno Agoes, *Auditing Pemeriksaan Akuntansi*, (Jakarta: fakultas ekonomi universitas Indonesia, 2014), h.200

Audit yang dilakukan auditor yang berasal dari lingkungan perusahaan itu sendiri disebut pemeriksaan intern. Pemeriksaan intern ini dapat dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki gelar akuntan, asalkan dia mengerti prosedur – prosedur intern perusahaan tersebut.¹⁰

Kerangka acuan praktek Institut Auditor Internal memberikan definisi audit intern berikut :

“Audit internal merupakan kegiatan pemastian dan konsultasi yang independen dan objektif yang didisain untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplinier untuk mengevaluasi keefektifan proses manajemen risiko, pengendalian, dan pemerintahan.

Tujuan auditor internal lebih luas dari pada tujuan auditor eksternal. Hal ini memberikan fleksibilitas ke auditor internal guna memenuhi kebutuhan perusahaan. Perusahaan yang berbeda akan berbeda pula luasnya audit internal dan bidang yang merupakan fokus audit internal. Misal, manajemen perusahaan dapat memutuskan bahwa auditor internal harus mengevaluasi pengendalian internal dan laporan keuangan masing-masing divisi setiap tahun, padahal yang lainnya dapat memutuskan auditor internal terutama harus bertindak sebagai konsultan dan memfokuskan pada rekomendasi yang mampu meningkatkan kinerja organisasi.¹¹

2. Fungsi Audit Internal dalam penerapan GOOD CORPORATE GOVERNANCE di Perbankan

Fungsi audit internal pada perbankan sangat penting, karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana

¹⁰ Sanyoto Gondodiyoto, *Audit Sistem Informasi* , h.42-45

¹¹ Al Arens, *et. al.*, *Auditing* (Jakarta: PT. Indeks, 2006), h.488

dari masyarakat luas. Disamping itu, menyadari kedudukan yang strategis dari perbankan dalam perekonomian, audit internal bank diharapkan juga mampu menjaga perkembangan bank ke arah yang dapat menunjang program pembangunan dari pemerintah. Dalam hubungan ini, kita perlu menciptakan kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan, independency, dan ruang lingkup pekerjaan audit internal bank sehingga peranan tersebut dapat terwujud.¹² Selain itu, perlu juga menciptakan dan merancang GOOD CORPORATE GOVERNANCE yang baik dalam perbankan, GOOD CORPORATE GOVERNANCE telah menjadi indikator dalam melakukan penilaian terhadap bank, hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/pbi/2006 bahwa GOOD CORPORATE GOVERNANCE menjadi ketentuan mendasar dalam penilaian perbankan.

Jadi, dengan kata lain, dapat disebut bahwa fungsi auditing ialah memberikan kredibilitas atas laporan-laporan keuangan. Laporan keuangan itu merupakan tanggung jawab manajemen, dan tanggung jawab auditor adalah memberikan pada laporan-laporan itu pertanggung jawaban.¹³

Selain sebagai memberikan kredibilitas atas laporan – laporan keuangan, audit internal juga berperan dalam mewujudkan GOOD CORPORATE GOVERNANCE di perbankan. Menurut, peraturan Bank Indonesia Nomor : 1/6/PBI/1999 Pasal 5, peran audit internal dalam mewujudkan GOOD CORPORATE GOVERNANCE yaitu :

- (1) menetapkan langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang – undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati – hatian.

¹²Daeng Naja, *Legal Audit Operasional Bank*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), h. 203

¹³ G. Kartasapoetra Widyaningsih, S.H., *Standar Auditing Internasional*, (Jakarta : PT BINA AKSARA, 1988), h.7

- (2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- (3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.

3. Auditing dan Kesehatan Bank

Salah satu tujuan *auditing* adalah terjaganya kesehatan bank, sebab kesehatan suatu bank tidak hanya menyangkut kepentingan dari usaha bank yang bersangkutan, tetapi juga mempunyai pengaruh terhadap perkembangan perbankan secara keseluruhan pada khususnya, dan perekonomian pada umumnya. Bank yang tidak sehat tentu mempunyai pengaruh negatif, begitupun sebaliknya bank yang sehat tentunya akan memiliki pengaruh yang positif pula.

Pada umumnya terdapat 5 pihak yang mempunyai kepentingan dalam kesehatan bank, yaitu : nasabah, masyarakat, pemilik, pengurus dan karyawan serta pemerintah . Yang menyangkut nasabah, dengan perkembangan perbankan yang sehat maka kebutuhan pembiayaan dan segala aktifitas yang menyangkut segi perekonomian pada umumnya, dapat dipenuhi. Di samping itu terjadi suatu sistem pembayaran yang baik yang diperlukan oleh masyarakat pada umumnya.¹⁴

Dalam melihat tingkat kesehatan bank, pihak audit mengetahuinya dengan cara menganalisis laporan keuangan pihak bank dan dengan melihat GOOD CORPORATE GOVERNANCE dari bank tersebut.

a) Penilaian GOOD CORPORATE GOVERNANCE pada Penilaian Kesehatan Bank

Pasal 7 ayat (2) pada PBI nomor: 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyebutkan bahwa Penilaian terhadap faktor GOOD

¹⁴Ibid., h.1

CORPORATE GOVERNANCE merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GOOD CORPORATE GOVERNANCE. Pada bagian penjelasan SE tersebut disebutkan bahwa: “Prinsip-prinsip GOOD CORPORATE GOVERNANCE dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GOOD CORPORATE GOVERNANCE mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Good Corporate Governance bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Pada metode RGEC, penetapan peringkat faktor GOOD CORPORATE GOVERNANCE dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GOOD CORPORATE GOVERNANCE Bank dan informasi lain yang terkait dengan GOOD CORPORATE GOVERNANCE Bank (Pasal 8 ayat 3). Hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GOOD CORPORATE GOVERNANCE Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Good Corporate Governance bagi Bank Umum hanya merupakan salah satu sumber penilaian peringkat faktor GOOD CORPORATE GOVERNANCE Bank dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Penetapan peringkat faktor GOOD CORPORATE GOVERNANCE secara konsolidasi – yaitu bank yang mempunyai bank lain sebagai anak perusahaan – dilakukan dengan memperhatikan: (a) signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau (b) Permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GOOD CORPORATE GOVERNANCE pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GOOD CORPORATE GOVERNANCE.

Petunjuk teknis penilaian GOOD CORPORATE GOVERNANCE selengkapnya tertuang dalam Surat Edaran No.13/24/DPNP Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2011. Tahap penilaiannya adalah sebagai berikut.

Pertama, penilaian faktor GOOD CORPORATE GOVERNANCE merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GOOD CORPORATE GOVERNANCE. Prinsip-prinsip GOOD CORPORATE GOVERNANCE dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GOOD CORPORATE GOVERNANCE berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Bank dalam menilai faktor GOOD CORPORATE GOVERNANCE menggunakan.¹⁵

b) Penilaian Laporan Keuangan

Untuk mengetahui kesehatan bank dan mengetahui kondisi keuangan bank dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh bank secara periodik. Dalam laporan keuangan yang dibuat bank menggambarkan kinerja bank selama periode tertentu. Pengolahan laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Analisis yang digunakan dalam hal ini menggunakan rasio-rasio keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu:

1. Rasio likuiditas
2. Rasio solvabilitas
3. Rasio rentabilitas.

1) RASIO LIKUIDITAS

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dengan catatan semakin besar rasio likuiditas maka semakin likuid. Perhitungan rasio likuiditas dengan cara:

¹⁵ <http://pena.gunadarma.ac.id/penilaian-kesehatan-bank-good-corporate-governance.com> .

Di akses tanggal 16 Agustus 2017.

1. Quick Ratio (mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya pada para deposan (pemilik giro, tabungan dan deposito) dengan harta yang paling likuid.

$$QR = (\text{Cash asset}) / (\text{Total Deposit}) \times 100\%$$

2. Investing Policy Ratio (mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi SB)

$$IPR = (\text{Securities}) / (\text{Total deposit}) \times 100\%$$

3. Banking Ratio (mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki). Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah tingkat likuiditas bank.

$$BR = (\text{Total Loans}) / (\text{total deposit}) \times 100\%$$

4. Assets to Loan Ratio (mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan harta yang dimiliki bank. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah tingkat likuiditas bank.

$$ALR = (\text{Total Loans}) / (\text{Total Assets}) \times 100\%$$

5. Cash Ratio (mengukur kemampuan bank melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid bank.

$$CR = (\text{liquid assets}) / (\text{short term borrowing}) \times 100\%$$

6. Loan to Deposit Ratio (mengukur komposisi kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri. Besarnya LDR menurut aturan pemerintah maksimum 110%

$$LDR = (\text{total Loans}) / (\text{total deposit} + \text{equity}) \times 100\%$$

2) RASIO SOLVABILITAS

Rasio ini digunakan mengukur kemampuan bank mencari sumber dana untuk membiayai kegiatan bank atau alat ukur untuk melihat kekayaan bank serta melihat efisiensi pihak manajemen bank. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan cara :

1. Primary Ratio (mengukur permodalan yang dimiliki bank memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total asset masuk dapat ditutupi oleh capital equity).

$$PR = (\text{Equity capital}) / (\text{total assets}) \times 100\%.$$

2. Risk Assets Ratio (mengukur kemungkinan penurunan risk assets.

$$RAR = (\text{Equity capital}) / (\text{total assets} - \text{cash assets} - \text{securities}) \times 100\%$$

3. Secondary Risk Ratio (Mengukur penurunan asset yang mempunyai resiko lebih tinggi).

$$SRR = (\text{Equity capital}) / (\text{Secondary risk assets}) \times 100\%.$$

4. Capital Ratio (mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama resiko yang terjadi karena ada kegagalan dalam menagih bunga bank).

$$CR = (\text{equity capital} + \text{reserve for loan losses}) / (\text{total loans}) \times 100\%$$

3) RASIO RENTABILITAS (profitabilitas usaha)

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan cara :

1. Gross Profit Margin (mengukur presentasi laba dari kegiatan usaha murni bank setelah dikurangi biaya-biaya).

$$GPM = (\text{operating income} - \text{operating expense}) / (\text{operating income}) \times 100\%.$$

2. Net Profit Margin (mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokok bank).

$$NPM = (\text{net income}) / (\text{operating income}) \times 100\%$$

3. Return Equity Capital atau ROE (mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola capital yang ada untuk mendapatkan net income)

$$ROE = (\text{net income}) / (\text{equity income}) \times 100\%$$

4. Return on Total Assets (mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola assets). Ada 2 cara yang dihitung antara lain:

- a) Gross Yield on Total Assets (mengukur kemampuan manajemen bank menghasilkan income dari pengelolaan asset)

$$GRTA = (\text{operating income}) / (\text{total assets}) \times 100\%$$

- b) Net Income Total Assets (mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial secara overall).

$$NITA = (\text{net income}) / (\text{total assets}) \times 100\%$$

5. Rate Return on Loans (mengukur kemampuan manajemen bank mengelola kredit bank)

$$\text{RRL} = (\text{interest income}) / (\text{total loans}) \times 100\%$$

6. Interest Margin on Earning Assets (mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya-biaya)

$$\text{IMEA} = (\text{interest income} - \text{interest expense}) / (\text{earning assets}) \times 100\%$$

7. Leverage Multiplier (mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola asetnya, dalam hal ini adanya biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penggunaan aktiva bank)

$$\text{LM} = (\text{total Assets}) / (\text{total equity})$$

8. Interest Margin on Loans

$$\text{IML} = (\text{Interest income} - \text{Interest expense}) / (\text{total loans}) \times 100\%$$

9. Assets Utilization (mengukur sejauh mana kemampuan manajemen bank mengelola asset dalam rangka menghasilkan operating income dan non-operating income)

$$\text{AU} = (\text{operating income} + \text{non operating income}) / (\text{total asset}) \times 100\%$$

10. Interest Expense Ratio (mengukur besarnya persentase bunga yang dibayar kepada para deposan bank dengan total deposit yang ada di bank)

$$\text{IER} = (\text{interest expense}) / (\text{total deposit}) \times 100\%.$$

11. Cost of Fund (mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan bank untuk sejumlah deposit bank).

$$\text{CF} = (\text{interest expense}) / (\text{total assets}) \times 100\%.^{16}$$

3. Audit Internal Dalam Perspektif Islam

Konsep audit syariah harus diperluas dengan suatu kegiatan yang saling berkaitan antara lain, sistem, produk, karyawan, lingkungan dan masyarakat .

¹⁶ <http://antohilya.blogspot.co.id/2011/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>.

Fungsi audit syariah dari perspektif Islam jauh lebih penting dan halus karena memanifestasikan akuntabilitas auditor tidak hanya kepada para pemangku kepentingan, tapi juga kepada Sang Pencipta Allah swt, seorang Muslim percaya bahwa tindakan dan pikiran seseorang selalu diawasi oleh Allah (konsep Muraqabah). Sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur'an surat An-nisa' ayat 86 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

"pasti Allah akan memperhitungkan semua hal"(QS. An Nisa ': 86).

Dalam mempertimbangkan pesatnya pertumbuhan pasar Islam, sangat penting bagi Industri keuangan Islam untuk memiliki 'check and balance' dalam bentuk audit syariah sesuai dengan tujuan dan misi dari 'maqasidal-syariah atau tujuan hukum Islam . Tujuan utama dari 'maqasid al-syariah' adalah pengakuan manfaat untuk orang-orang (maslahahummah), yang berkaitan dengan urusan mereka baik di dunia dan di akhirat. Audit syariah adalah "Penilaian berkala yang dilakukan dari waktu ke waktu, untuk memberikan penilaian yang independen dan obyektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam kaitannya dengan kegiatan lembaga keuangan Islam dengan tujuan utama untuk memastikan sistem pengendalian internal yang efektif untuk kepatuhan syari'ah"

Landasan syariah dari pelaksanaan audit syariah antara lain dapat dirujuk pada penafsiran atas QS. Al Hujurat : 6 yang terjemahan artinya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan

kamu menyesal atas perbuatanmu itu."

Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadipenting, mengingat keduanya dapat menjadi sumber malapetaka ekonomiberupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola secara maksimal. Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah.

Bank Syariah menjadi salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memiliki karakteristik berbeda dengan entitas konvensional. Perbedaan karakter tersebut mempengaruhi bentuk dan standar dalam kegiatan pengawasan lembaga bank syariah termasuk pelaksanaan auditnya. Pengawasan bank syariah yang berada dalam otoritas jasa keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dilakukan dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam operasional kegiatannya dan pelaporannya sesuai konsep perbankan syariah serta sesuai prinsip akuntansi bertema umum.

Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang utama dalam pengendalian aspek syariah dan auditor memiliki peran utama dalam menguji (examination) penyajian laporan keuangan yang fair. Adapun standar audit yang berlaku pada LKS termasuk bank Syariah adalah standar audit yang dikeluarkan dan disahkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) yang berada di Manama, Bahrain. LKS khususnya bank syariah bergerak di sektor keuangan (finance)

yang umumnya memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaan bisnisnya. Dalam mewujudkan pengawasan bank syariah yang efektif dan efisien maka OJK, DSN, dan DPS harus saling bekerja sama dalam mengemban tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Bank syariah memiliki stakeholder seperti pemegang saham, manajemen, karyawan dan masyarakat luas. Setiap mereka memiliki minat yang kuat berkaitan dengan kelangsungan bank syari'ah untuk menegakkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Syariah. Salah satu cara untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan adalah dengan memastikan operasi kepatuhan syariah dan menawarkan layanan kepatuhan syari'ah. Untuk melakukannya, audit syariah memastikan bahwa Perbankan Islam dapat menegakkan tata kelola syariah dan pada saat yang sama juga dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dalam sistemnya.

Audit syari'ah memiliki peranan yang penting karena adanya kesadaran yang tumbuh di antara lembaga-lembaga Islam bahwa setiap lembaga harus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dari hukum Islam -yang berlandaskan Maq'asid Ash-Shariah. Konsep audit syariah harus diperluas dengan suatu kegiatan yang saling berkaitan antara lain, sistem, produk, karyawan, lingkungan dan masyarakat. Fungsi audit syariah dari perspektif Islam jauh lebih penting dan halus karena memanifestasikan akuntabilitas auditor tidak hanya kepada para pemangku kepentingan, tapi juga kepada Sang Pencipta Allah swt, seorang Muslim percaya bahwa tindakan dan pikiran seseorang selalu diawasi oleh Allah (konsep Muraqabah). Sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur'an surat An-nisa' ayat 86 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيرًا

"pasti Allah akan memperhitungkan semua hal"(QS. An Nisa ': 86).

Dalam mempertimbangkan pesatnya pertumbuhan pasar Islam, sangat penting bagi Industri keuangan Islam untuk memiliki 'check and balance' dalam

bentuk audit syariah sesuai dengan tujuan dan misi dari 'maqasidal-syariah' atau tujuan hukum Islam. Tujuan utama dari 'maqasid al-syariah' adalah pengakuan manfaat untuk orang-orang (masalahummah), yang berkaitan dengan urusan mereka baik di dunia dan di akhirat. Audit syariah adalah "Penilaian berkala yang dilakukan dari waktu ke waktu, untuk memberikan penilaian yang independen dan obyektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam kaitannya dengan kegiatan lembaga keuangan Islam dengan tujuan utama untuk memastikan sistem pengendalian internal yang efektif untuk kepatuhan syari'ah"

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengeluarkan dan mensahkan standar audit yang berlaku pada lembaga keuangan syariah termasuk bank yang kemudian banyak diacu di berbagai negara. Standar Auditing AAOIFI untuk audit pada lembaga keuangan syariah sendiri mencakup lima standar, yaitu tujuan dan prinsip (objective and principles of auditing), laporan auditor (auditor's report), ketentuan keterlibatan audit (terms of audit engagement), lembaga pengawas syariah (shari'a supervisory board), tinjauan syariah (shari'a review).

Meskipun pentingnya audit syariah, ada sedikit pemahaman tentang bagaimana untuk melatih auditor syariah yang berkualitas dan dapat melakukan audit yang efektif dan efisien. Salah satu pedoman penting yang tersedia adalah tata kelaola syari'ah di mana dinyatakan bahwa audit syariah dilakukan oleh auditor internal dari Perbankan Islam yang telah memperoleh pengetahuan syariah dan melakukan pelatihan. Pada dasarnya, menunjukkan bahwa kompetensi auditor syariah mirip dengan persyaratan kompetensi auditor internal tapi dengan pelatihan tambahan dalam hal syariah.

Dalam hal kompetensi seorang auditor syari'ah sangat diperlukan. Kompetensi dapat dilihat sebagai kemampuan manusia atau harapan untuk melakukan tugas tertentu dalam suatu organisasi serta kemampuan dari suatu organisasi tertentu melalui alat atau sistem untuk melakukan fungsi tertentu

dalam memastikan operasi terus menerus dari organisasi. Mengingat kompetensi auditor syariah, tentu audit syariah memiliki kompetensi yang harus dikuasai oleh auditor untuk memastikan kinerja maksimum yang bisa disampaikan kepada para pemangku kepentingan di bank.

Hanya perspektif holistik pada manusia yang dapat menghasilkan karyawan dengan pengetahuan seimbang yang tidak hanya kompeten secara akademis tetapi yang paling penting memiliki pengetahuan dan komitmen yang kokoh untuk dasar-dasar ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam perbankan Islam, kita harapkan lulusan dari Indonesia juga memahami Standar Akuntansi Internasional serta standar yang diadopsi oleh negara-negara Muslim lain jika mereka ingin bekerja di negara lain selain Indonesia.

Dalam menjalankan fungsinya OJK dan DSN lebih berperan dalam pengawasan, sedangkan DPS lebih berperan dalam pengendalian bank syariah. Kegiatan audit pada Bank Syariah terdiri dari tiga lapis, yaitu lapis pertama, audit internal yang dilakukan oleh auditor internal bank syariah yang bertugas dalam menguji (examination) kesesuaian laporan keuangan Bank Syariah yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak ada salah saji yang bersifat material, lapis kedua, Audit eksternal yang dilakukan oleh auditor dari luar bank syariah seperti OJK atau akuntan publik yang tugasnya menguji kembali keakuratannya dari hasil audit internal, dan lapis ketiga, audit Syariah yang dilakukan oleh auditor bersertifikasi atau memiliki gelar Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) yang bertugas untuk memastikan bahwa produk dan transaksi bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah.

Adapun auditor syariah akan menunjukkan hasil auditnya dengan memberikan opini apakah Bank Syariah yang diaudit dinyatakan sharia compliance atau tidak. Apabila terjadi suatu kesalahan ataupun pelanggaran dalam kegiatan audit di Bank Syariah, maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah manajemen bank Syariah, sedangkan tanggung jawab auditor terletak pada

opini yang diberikan. Adapun untuk kegiatan audit Syariah hendaknya dijalankan sesuai mekanisme yang benar dan disesuaikan dengan standar audit AAOFI yang berlaku pada seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Segala kelemahan yang ada dalam sistem audit, seperti faktor human error, asymmetric information, dan lainnya hendaklah diminimalkan untuk mencapai hasil yang tepat.¹⁷

4. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Pada Bank Umum

Bank umum diwajibkan membentuk SKAI sebagai bagian dari penerapan standar pelaksanaan fungsi Audit Internal Bank. SKAI merupakan satuan kerja yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan tidak langsung.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.¹⁸

5. Peran Audit Internal

Audit internal disebut “internal” karena mereka bekerja pada satu entitas dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada manajemen atau (idealnya) kepada komite audit entitas atau dewan komisaris. Mereka biasanya tidak diminta untuk

¹⁷ http://www.kompasiana.com/imaaceh/pentingnya-auditor-syariah-di-perbankan-islam_573e61bf63afbd5c052e1472 di akses pada tanggal 23 Agustus 2017

¹⁸Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia 2012*, (Jakarta : Bank Indonesia , 2012), h. 150

menyampaikan laporan kepada publik atau pihak diluar entitas. Tetapi, fungsi audit internal berbeda secara luas dalam bagaimana mereka dikelola dan ditugaskan. Beberapa entitas memiliki fungsi audit internal yang ditugaskan secara penuh “di dalam rumah” sementara yang lain “di datangkan diluar”. Hal ini telah menjadi sumber yang signifikan atas pendapat dari banyak kantor akuntan. Idealnya suatu entitas akan memiliki direktur audit yang perannya adalah untuk mengawasi fungsi audit internal dan untuk membantu mengkoordinasikan pekerjaan audit internal dan eksternal.¹⁹

6. Proses melaksanakan Audit Internal

Proses melaksanakan audit internal serupa dengan proses melaksanakan audit eksternal. Perwakilan manajer dan karyawan serta seluruh perusahaan harus dilibatkan dalam menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Audit internal memerlukan pengumpulan dan pengolahan informasi mengenai manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi manajemen.

Untuk dapat melakukan Audit Internal perlu ada kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi informasi mengenai operasi perusahaan. Menurut William King, sebuah gugus tugas atau tim khusus yang terdiri dari para manager dari unit yang berbeda dalam sebuah organisasi, yang didukung oleh sejumlah staf.²⁰

Hal – hal yang dilakukan dalam pengawasan internal secara tepat yaitu :

1. Memastikan (menentukan, memverifikasi).

¹⁹ William, *et. al.*, *Auditing & Assurance*, (Jakarta: Salemba empat, 2006), h. 515

²⁰ Fred R. David, *Manajemen Strategis Kosep-Konseps*, (Jakarta : PT.INDEKS, 2004), h. 176.

2. Menilai (mengevaluasi, menaksir),
3. Merekomendasi (memberi salam).²¹

B. GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1. Definisi GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Berdasarkan SK Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.²²

Menurut Syakhroza (2003) mendefinisikan GOOD CORPORATE GOVERNANCE sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih focus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai prinsip-prinsip diatas sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan sesuai harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.²³

Corporate Governance (CG) merupakan isu yang relative baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum CG terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas di antara para pihak

²¹Hiro Tugiman, *Internal Auditing The New Internal Auditing Courtemance*, (Yogyakarta : Kanisius, 1997), h.17

²²Sutedi Adrian, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1

²³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.126

yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal.

Dalam literatur lain disebut bahwa Good Corporate Governance (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain. Dari pengertian tersebut, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa GOOD CORPORATE GOVERNANCE tidak lain adalah permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan yang secara konseptual mencakup di aplikasikannya prinsip-prinsip *transparency, accountability, fairness dan responsibility*.

Banyak kesulitan muncul dalam mengidentifikasi peran pengawas internal sebagai akibat dari pengabaian terhadap sesuatu yang telah nyata, yaitu bahwa pengawas internal itu merupakan suatu peran, pengawas internal tidak diawasi hanya bagi gelar akademis tertentu atau terhadap suatu aspek fungsional tertentu dalam perusahaan, seperti akuntansi misalnya. menjadi seorang pengawas internal sama seperti menjadi seorang manajer. Tidak seorang pun yang berusaha untuk membatasi julukan manajer hingga hanya terbatas bagi seseorang dengan latar belakang akademi tertentu atau pada suatu area fungsional tertentu dalam perusahaan. Julukan manajer menunjuk kepada suatu peran, demikian pula halnya dengan istilah pengawas internal.

Dengan demikian, apabila seorang insinyur ditugaskan pada bagian pengawasan internal dan ia bertugas untuk memastikan, menilai, atau merekomendasikan sesuatu berdasarkan posisinya yang independent, ia menjalankan peran sebagai seorang pengawas internal atau auditor internal.²⁴

²⁴ John wiley and sons(ed.) *Internal auditing THE NEW INTERNAL AUDITING*, (Yogyakarta : KANISIUS, 1997).h. 21

Sampai saat ini para ahli tetap menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan GOOD CORPORATE GOVERNANCE yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Tidak terbentuknya definisi yang akomodatif bagi semua pihak yang berkepentingan dengan GOOD CORPORATE GOVERNANCE disebabkan karena cakup GOOD CORPORATE GOVERNANCE yang lintas sektoral. GOOD CORPORATE GOVERNANCE dapat didekati dengan berbagai disiplin ilmu antara lain ilmu makro ekonomi, teori organisasi, teori informasi, akuntansi, keuangan, manajemen, psikologi, sosiologi dan politik.

Definisi GOOD CORPORATE GOVERNANCE menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manager serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuan utama dari GOOD CORPORATE GOVERNANCE adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.²⁵

2. Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai Good Corporate Governance berkaitan dengan hadits Rasulullah

²⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2010), h.292

SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik”.

Muqorobin menyatakan bahwa Good Corporate Governance dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini:²⁶

1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktifitas Umat Islam, baik dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya.

Dalam Alquran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 38 :

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ
مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaKu, Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, Apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". kepada- Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri”.

Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi. Baik menyangkut ibadah maupun Muamalah. Sehingga semua aktivitas

²⁶Masyudi Muqorobin ,*Fikih Tata Kelola Organisasi Laba Sebuah Pengantar* (Universitas Muhammadiyah: Purwokerto), h.4.

yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah.

Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

2. Taqwa dan ridha

Prinsip atau asas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun asas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas fondasi taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Dalam QS. at-Taubah: 109.

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ

شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْتَهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

“Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

3. Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan)

Tawazun atau mizan (keseimbangan) dan al-‘adalah (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. Tawazun lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah al-‘adalah atau keadilan sebagai manifestasi Tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah SWT berfirman dalam QS ar-Rahman ayat 7-9 :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا
الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Tatakelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* selanjutnya disingkat dengan GOOD CORPORATE GOVERNANCE adalah proses untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai Pemilik Modal/RPB dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* perusahaan berlandaskan peraturan dan nilai etika. *Stakeholders* perusahaan antara lain pemilik, kreditor, pemasok, asosiasi usaha, karyawan, pelanggan, pemerintah dan masyarakat luas.

Dalam konteks keadilan (sosial), para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajibannya.

4. Kemashlahatan

Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefenisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat,

kerusakan dan mufسادah. Imam al Ghazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni:²⁷

- a) Pemeliharaan agama (hifdzud-din)
- b) Pemeliharaan jiwa (hifhzun-nafs)
- c) Pemeliharaan akal (hifhzul-‘aql)
- d) Pemeliharaan keturunan (hifhzun-nasl)
- e) Pemeliharaan harta benda (hifhzul-maal)

Governance pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan *governance* pada lembaga keuangan non-bank. Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok *stakeholders* yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga. Namun, keberadaan kelompok deposan pada perbankan konvensional tidaklah terlalu banyak memengaruhi struktur *governance* bank. Alasannya yaitu :

- a) Secara akad bank telah menetapkan jaminan untuk membayar penuh simpanan nasabah
- b) Penerapan skema penjaminan baik oleh lembaga penjamin simpanan maupun pemerintah
- c) Penerapan secara ketat sejumlah rambu-rambu dalam bentuk ketentuan kehati-hatian perbankan oleh otoritas pengawasan perbankan

Faktor-faktor inilah yang melindungi kepentingan nasabah deposan terhadap kepentingan stakeholder lainnya dalam bank, sehingga mengurangi desakan perlunya struktur *governance* yang khusus untuk melindungi kepentingan para deposan bank.

Adapun beberapa prinsip islam yang mendukung bagi terlaksana GOOD CORPORATE GOVERNANCE atau tata kelola didunia perbankan adalah prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut merupakan bagian dari sistem

²⁷Amiur Nuruddin and Veithzal Rivai (ed.) *Islamic Business and economic Ethic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 58.

syariah. Pelaksanaan sistem syariah pada perbankan syariah dapat dilihat dari dua perspektif yaitu, perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati.

3. Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Bank Umum

Definisi CGC menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Dalam ketentuan ini, GOOD CORPORATE GOVERNANCE merupakan suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Pokok-pokok pelaksanaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank, penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategis bank dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Setiap bank diwajibkan melakukan penilaian atas pelaksanaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE, menyusun laporan pelaksanaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE tersebut secara berkala, dan kemudian akan dinilai oleh BI.²⁸

²⁸ Departemen perizinan dan informasi, *Book Perbankan*, h. 149

4. Pelaksanaan Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah

Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah disebutkan bahwa Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance oleh sebuah bank dibagi dalam dua golongan, yaitu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.²⁹

Prinsip Good Corporate Governance tersebut, yaitu :

a. *Transparency (Keterbukaan)*

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

b. *Accountability (Akuntabilitas)*

Accountability (Akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari agency problem (Bentuk Kepentingan Peran).

c. *Responsibility (Pertanggung Jawaban)*

Responsibility (Pertanggung Jawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi

²⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2016), hal.189-201

yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian dan persaingan yang sehat.

d. Independency (Kemandirian)

Independency (Kemandirian) adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

e. Fairness (Kesetaraan Dan Kewajaran)

Fairness (Kesetaraan Dan Kewajaran) dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati, sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil. Fairness menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Corporate governance (CG) merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum CG terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas di antara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan usahanya secara optimal.

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan definisi teknis dalam praktik ekonomi yang telah menjadi bahasa

pemerintahan. Istilah lain dalam pengertian ini yang lazim digunakan adalah *good public governance*, *good government governance*, *good nation governance*, atau *good civil governance*. Kosa kata ini dikenalkan di publik Indonesia ketika tahun 1997-an perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ambruk, yang di sebabkan tidak patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip GOOD CORPORATE GOVERNANCE.

Sebenarnya, Good Corporate Governance merupakan bentuk pengaturan internal dalam suatu badan usaha (self regulation), yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham (shareholders value) serta mengakomodasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Pentingnya tata kelola perusahaan yang baik sebagai alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan panjang secara berkesinambungan bagi seluruh stakeholder.

Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional, mengingat resiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan agar semakin meningkat seiring dengan perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya yang disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan exposure risiko bank.³⁰

Untuk membantu dalam membuat regulasi tentang standard dalam melakukan kegiatan operasional perbankan syariah, maka pada tahun 2002 didirikan Islamic Financial Service Board (IFSB) oleh Konsorsium Bank Sentral dan Islamic Development Bank (dengan dukungan dari IMF) dengan mandat meliputi penyediaan standard dan panduan untuk aplikasi internasional oleh pengawas perbankan dalam mengawasi Bank Syariah.

³⁰ Sutedi, *Good Corporate Governance*, h. 128

Dalam konteks Bank Syariah, Corporate Governance harus meliputi :

- a. Sebuah kumpulan dari kesiapan organisasi di mana ada keselarasan tindakan manajemen dari Bank Syariah, sejauh yang dimungkinkan, yang sejalan dengan keinginan stakeholders.
- b. Penyediaan insentif yang sesuai untuk organ-organ dari governance seperti Dewan Direktur, Dewan Syariah dan Manajemen untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan keinginan stakeholders dan memfasilitasi monitoring yang efektif, yang akan mendorong Bank Syariah untuk menggunakan sumber dayanya dengan lebih efektif.
- c. Kepatuhan dengan peraturan dan prinsip-prinsip syariah³¹.

5. Good Corporate Governance Dalam Perbankan Indonesia

Untuk tetap menjaga momentum proses pemulihan ekonomi, respons kebijakan di bidang perbankan difokuskan pada upaya mempercepat pemulihan fungsi intermediasi perbankan. Langkah percepatan pemulihan fungsi perbankan ditempuh melalui pelonggaran beberapa ketentuan perbankan agar industri perbankan dapat dengan cepat terdorong melakukan ekspansi kredit. Kendatipun langkah pelonggaran disektor perbankan dilakukan, kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia tetap mengedepankan upaya penciptaan kedisiplinan pengelolaan bank melalui pemenuhan prinsip-prinsip *prudential* perbankan dan penerapan Good Corporate Governance agar tetap mendorong upaya menciptakan industri perbankan yang aman, sehat, dan kuat.

Dalam rangka peningkatan Mutu Pengelolaan Perbankan (Good Corporate Governance), salah satu upaya dalam rangka memantapkan ketahanan sistem perbankan adalah peningkatan mutu pengelolaan perbankan, yang antara lain dilakukan melalui pelaksanaan *program fit and proper test* terhadap pemilik dan

³¹Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.170-174

pengurus bank (*new entry*), penunjuk direktur kepatuhan (*compliance director*), dan investigasi tindak pidana di bidang perbankan melalui pembentukan Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) di Bank Indonesia.³²

6. Dasar Hukum dan Relevansi Tata Kelola yang Sehat (Good Corporate Governance) Bagi Bank Syariah

Pelaksanaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE bagi Bank Umum dilaksanakan berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, yang menetapkan bahwa Bank Umum diwajibkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GOOD CORPORATE GOVERNANCE Dalam setiap kegiatan usahanya, termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, serta langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Penerapan Good Corporate Governance di lembaga Perbankan Syariah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak terbantahkan. Bahkan Bank-bank syariah harus tampil sebagai pionir terdepan dalam mengimplementasikan GOOD CORPORATE GOVERNANCE tersebut.

7. Tujuan Penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) Bagi Bank Syariah

Bank Indonesia dalam rangka program restrukturisasi perbankan nasional pada tahun 2004 telah meluncurkan arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industry perbankan Indonesia ke depan. Arah kebijakan pengembangan industry perbankan dimaksud dilandasi oleh visi mencapai kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

³² Sutedi, *Good Corporate Governance*, h.83-84

Dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan penerapan GOOD CORPORATE GOVERNANCE bagi Bank Umum, yaitu :

- a. Meningkatkan kinerja Bank Umum
- b. Melindungi kepentingan seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha bank umum (*stakeholder*)
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku umum pada industri perbankan.
- d. Memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan APL.

8. Prinsi-prinsip Good Corporate Governance bagi Perbankan Syariah

Pemerintah pusat maupun daerah serta beberapa perusahaan sudah mulai menerapkan praktik GOOD CORPORATE GOVERNANCE, tak terkecuali perusahaan yang berbasis syariah yang salah satunya adalah perbankan syariah. Bagi perbankan syariah, penerapan GOOD CORPORATE GOVERNANCE sangat penting, karna banyaknya stakeholders yang terlibat serta adopsi nilai-nilai islam dalam aktivitasnya, yang menyebabkan perlunya hubungan yang baik di antara para *stakeholders* dengan manajemen, sehingga perbankan syariah dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.³³

³³ *Ibid.* h. 129-132

Menurut Christian Herdinata (2008), prinsip-prinsip GOOD CORPORATE GOVERNANCE memegang peranan penting, antara lain:

1. Pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja suatu perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham atau calon investor untuk menanamkan modalnya;
2. Perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh direksi atau komisaris perusahaan;
3. Perwujudan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di negara asalnya atau tempatnya berdomisili secara konsisten, termasuk peraturan dibidang lingkungan hidup, persaingan usaha, ketenagakerjaan, perpajakan, perlindungan konsumen, dan sebagainya.

Good Corporate Governance akan memberikan empat manfaat besar (Wilson Arafat, 2008:10), yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
2. Meningkatkan corporate value.
3. Meningkatkan kepercayaan investor.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder's value dan dividen.

Keberhasilan Bank Syariah dalam menghadapi Krisis, membuat pemerintah semakin yakin terhadap masa depan bank syariah. Bahkan tidak berlebihan jikadikatakan, bank syariah dapat dijadikan salah satu model restrukturisasi perbankan nasional.³⁴

³⁴ Azhari Akmal, *Dari Etika ke Spiritualitas Bisnis*, (Medan : IAIN Press, 2014), hal.139

C. Kajian Terdahulu

Mengingat pentingnya masalah audit internal dalam menerapkan GOOD CORPORATE GOVERNANCE di Perbankan. Maka, wajar jika penelitian yang berhubungan dengan peranan audit internal dalam menerapkan GOOD CORPORATE GOVERNANCE pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Di antara penelitian yang pernah dilakukan tentang masalah ini, adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Jurnal Penelitian oleh Retno Wulandari, SE, MSA (2016), yang berjudul “Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang Peran Audit Internal dalam Mewujudkan GOOD CORPORATE GOVERNANCE Kabupaten Blitar). Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah berdasarkan korelasi model pearson peran audit internal dalam perwujudan Good Corporate Governance menunjukkan nilai signifikansi $0.038 < 0,05$ audit internal berhubungan terhadap Good Corporate Governance. Hubungan independensi terhadap Good Corporate Governance menunjukkan nilai signifikansi $0.343 > 0,05$ independensi tidak berhubungan terhadap Good Corporate Governance. Hubungan kemampuan profesional terhadap Good Corporate Governance menunjukkan nilai Signifikansi $0.536 > 0,05$ kemampuan profesional tidak berhubungan terhadap Good Corporate Governance. Berdasarkan korelasi model pearson hubungan lingkup pekerjaan terhadap Good Corporate Governance menunjukkan nilai Signifikansi $0.909 > 0,05$ lingkup pekerjaan tidak berhubungan terhadap Good Corporate Governance. Hubungan pelaksanaan kegiatan terhadap Good Corporate Governance menunjukkan nilai Signifikansi $0.402 > 0,05$ pelaksanaan kegiatan berhubungan terhadap Good Corporate Governance sedangkan hubungan manajemen audit internal terhadap Good Corporate

Governance menunjukkan nilai Signifikansi $0.030 < 0,05$ manajemen bagian audit berhubungan terhadap Good Corporate Governance.³⁵

- b. Penelitian Chandra Setiawan Tri Yuwono (2011) yang berjudul “PENGARUH PERANAN AUDITOR INTERNAL TERHADAP PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BUMN JEMBER”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah peranan auditor internal berpengaruh terhadap penerapan Good Corporate Governance. kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah peranan Auditor Internal tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerapan GOOD CORPORATE GOVERNANCE pada BUMN Jember.³⁶

³⁵ Retno Wulandari, “Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang Peran Audit Internal dalam Mewujudkan GOOD CORPORATE GOVERNANCE Kabupaten Blitar)” [http// ejournal.unikam.ac.id](http://ejournal.unikam.ac.id). Di unduh pada 11 Mei 2017.

³⁶ Chandra Setiawan Tri Yuwono, “ Pengaruh Peranan Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Pada BUMN Jember” [http// repository.unej.ac.id](http://repository.unej.ac.id). Di unduh pada 11 Mei 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Menurut Bogdan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi , untuk keperluan peneliti, penulis melakukan penelitian pada bank Sumut Syariah Kantor cabang bridgjen katamso Medan Sumatera Utara.

Waktu , waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli 2017.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang berhubungan langsung dengan perusahaan (Bank), yang ingin diteliti bank Sumut data yang didapat dari sumber baik individu maupun kelompok.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat peneliti secara tidak langsung seperti data dari perantara, dan mencantumkan literatur-literatur seperti dari buku-buku, jurnal penelitian, makalah, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan judul.

³⁷ Lexy. J. Meleong (ed.), Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.4.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan beberapa proses pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya.³⁸ Prosedur ini digunakan untuk menemukan data dan informasi obyektif, sesuai dengan fenomena, serta apa adanya.

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara intersep, dan wawancara telepon.³⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴⁰

E. Analisis Data

Menurut Moleong analisis data kualitatif upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang

³⁸ Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2007), h. 89

³⁹ Ibid, h. 93

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.231

dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Moleong, analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut:

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensistensikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dalam hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode analisis data deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Pada Bank Sumut Syariah Medan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

A. Sejarah PT Bank SUMUT

Bank pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan sebutan BPSU. Sesuai dengan ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara maka pada tahun 1962 bentuk usaha dirubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp.100 Juta dengan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera Utara.

Pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU dirubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, JL. Imam Bonjol No.18 Medan. Modal dasar pada saat itu menjadi Rp.400Milyar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, di tahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 500 Milyar.

Laju pertumbuhan Bank Sumut kian menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dilihat dari kinerja dan prestasi yang diperoleh dari tahun ke tahun.⁴¹

TABEL 4.1

LAJU PERTUMBUHAN ASSET BANK SUMUT TAHUN 2009 - 2017

TAHUN	TOTAL ASSET
2009	10,75 Triliyun
2010	12,76 Triliyun
2011	18,95 Triliyun

⁴¹[http: // www.banksumut.com/ statis-5-sejarah.html](http://www.banksumut.com/statis-5-sejarah.html). Diunduh pada tanggal 4 Mei 2017.

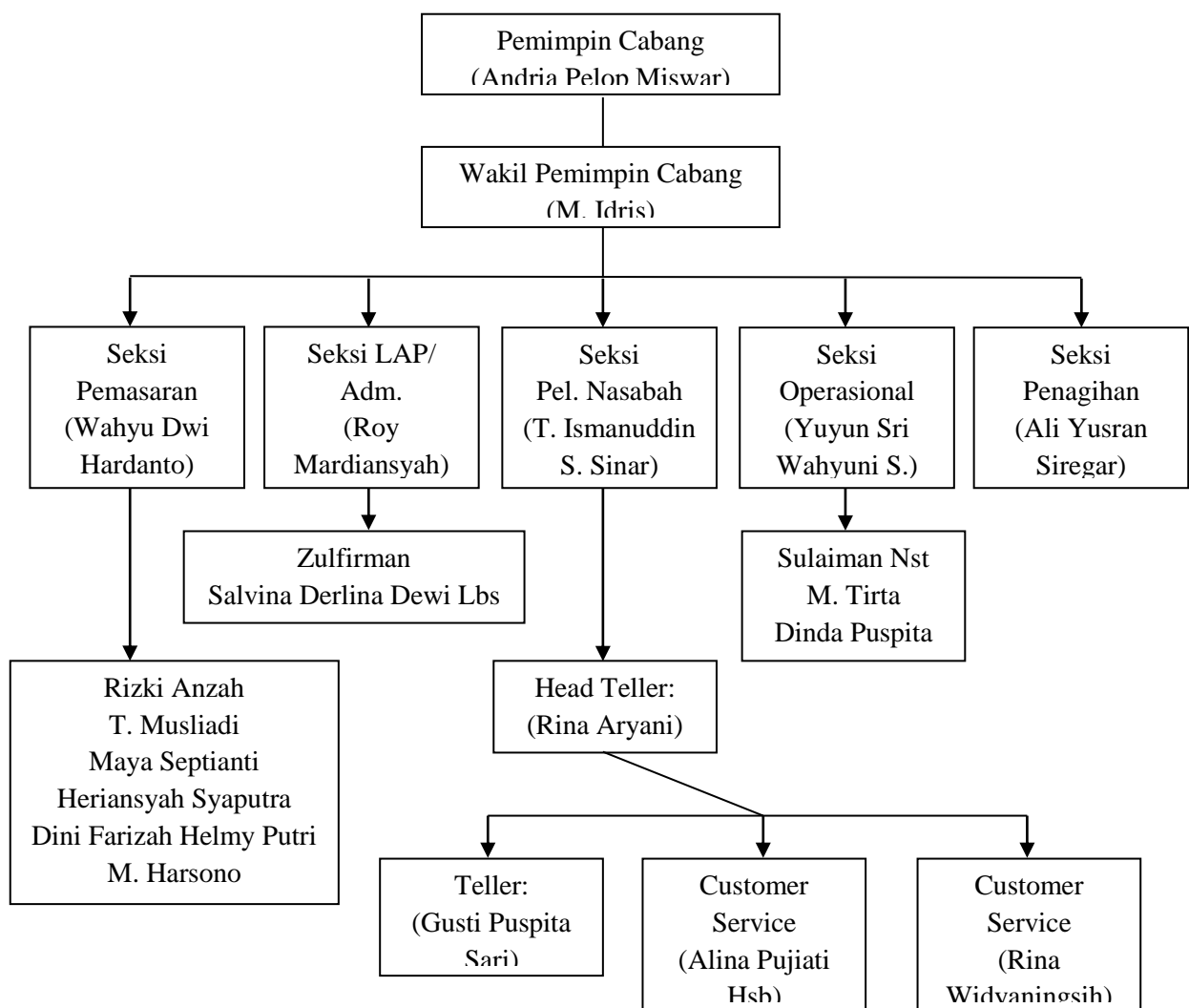
2012	19, 96 Triliyun
2013	21, 51 Triliyun
2014	23, 39 Triliyun
2015	24, 13 Triliyun
2016	26, 17 Triliyun

Sumber : Data Sekunder yang di olah 2017

Jadi, total asset Bank Sumut dari tahun ketahun mengalami peningkatan selama 7 tahun terakhir.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bank Sumut Syariah Medan



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Sumut
C. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

a. Visi Perusahaan

Adapun visi dari PT Bank SUMUT Syariah adalah menjadi bank andalan bagi masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

b. Misi Perusahaan

Adapun misi dari PT Bank SUMUT Syariah adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance* (kepatuhan).⁴²

c. Budaya Perusahaan

Adapun PT Bank SUMUT Syariah sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah menetapkan budaya yang spesifik yaitu memberikan pelayanan terbaik. Adapun penjabaran dari kata terbaik adalah sebagai berikut:

1. Berusaha untuk selalu terpercaya;
2. Energik di dalam melakukan setiap kegiatan;
3. Senantiasa bersikap ramah;
4. Membina hubungan secara bersahabat;
5. Menciptakan suasana yang aman dan nyaman;
6. Memiliki integritas tinggi;
7. Komitmen penuh untuk memberikan yang terbaik.

D. Fungsi Bank SUMUT

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT Bank SUMUT berfungsi sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah

⁴²<http://www.banksumut.com/statis-2-visidanmisi.html>. Diunduh pada tanggal 4 Mei

dengan melaksanakan kegiatan usaha sebagai Bank SUMUT seperti dimaksudkan pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

E. Sumber Daya Manusia

Bank SUMUT terus melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan kepada pejabat dan pegawai untuk mengikuti pendidikan kepada lembaga pendidikan perbankan maupun institusi pendidikan lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga diharapkan dapat meningkatkan budaya risiko, budaya perusahaan dan profesionalisme.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan memitigasi risiko kepada seluruh pejabat struktural diwajibkan mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR).

Manajemen Risiko untuk tingkat I, tingkat II, tingkat III, tingkat IV dan tingkat V. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan, maka telah dilaksanakan program *General Check-Up* untuk pegawai dengan usia tertentu dan selanjutnya pegawai tersebut harus menindaklanjuti hasilnya dan memanfaatkan fasilitas asuransi kesehatan yang disediakan Bank. Kepada seluruh pegawai juga diwajibkan senantiasa menjaga kesehatan dengan melakukan kegiatan olahraga yang teratur dan menerapkan pola hidup sehat.

F. Unit Usaha Syariah Bank SUMUT

Dalam upaya mewujudkan visinya, Bank SUMUT telah mewujudkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2004 Bank SUMUT dengan suratnya No.6/142/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2004 dan Bank SUMUT UUS dibuka pada tanggal 04 November 2004 dengan 2 Unit Kantor Operasional yaitu:

1. Kantor Cabang Syariah Medan
2. Kantor Cabang Syariah P. Sidempuan

Kemudian Bank SUMUT UUS semakin menambah jaringan operasionalnya yaitu:

1. Kantor Cabang Syariah T. Tinggi
2. Kantor Cabang Syariah Sibolga
3. Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar
4. Kantor Cabang Pembantu Syariah H.M. Joni
5. Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelان Raya
6. Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya
7. Kantor Cabang Pembantu Syariah H.M. Yamin
8. Layanan Syariah sebanyak 22 unit dan konvensional sebanyak 68 unit

Pembentukan unit usaha syariah ditujukan untuk memberikan layanan perbankan yang lebih luas kepada masyarakat yang berkeinginan mendapatkan layanan perbankan yang lebih selaras dengan prinsip hukum Islam.

Melalui pelayanan produk dan jasa perbankan yang lebih luas tersebut diharapkan Bank SUMUT dapat mendorong partisipasi masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui prinsip-prinsip bagi hasil dalam pertumbuhan ekonomi.⁴³

G. Prestasi dan Reputasi Unit Syariah Bank SUMUT

Prestasi dan reputasi yang telah diraih Unit Usaha Syariah Bank SUMUT, yaitu:

1. Unit Usaha Syariah terbaik tahun 2006 dengan asset < Rp 100 M dari Karim Bussines Consulting Jakarta.
2. Most Prudent Unit Usaha Syariah 2006 dengan asset < Rp 100 M dari Karim Bussines Consulting Jakarta.
3. Unit Usaha Syariah Terbaik tahun 2007 dengan asset < Rp 100 M dari Majalah Investor Jakarta.

⁴³<http://www.banksumut.com/statis-34-profil.html>. Diunduh pada tanggal 4 Mei 2017

H. Logo Perusahaan



Kata kunci dari logo PT Bank SUMUT adalah sinergi yaitu kerja sama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang lebih baik. Berbekal kemajuan kerja keras yang didasari dengan profesionalisme dan siap memberikan pelayanan terbaik.

Bentuk logo Bank SUMUT menggambarkan dua elemen yaitu dalam bentuk huruf U yang saling bersinergi membentuk huruf S yang merupakan awal kata dari SUMUT. Sebuah gambaran bentuk kerjasama yang erat antara PT Bank SUMUT dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana yang tertera pada visi Bank SUMUT.

Warna orange yang ada pada logo Bank SUMUT sebagai simbol atau hasrat untuk terus maju yang dilakukan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan profesional, sebagaimana yang ada dalam motto atau statement budaya Bank SUMUT.

Warna putih dalam logo Bank SUMUT mengungkapkan ketulusan hati dalam melayani nasabah, sebagaimana yang ada dalam motto atau statement budaya Bank SUMUT.

Jenis huruf Platino Bold yang sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

I. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Tata cara beroperasi Bank Syariah pada umumnya yaitu Bank SUMUT Syariah pada khususnya tentunya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits. Prinsip Unit Usaha Syariah ini menjadi panduan dalam menerapkan fitur-fitur produk Bank SUMUT Syariah, baik itu produk pembiayaan maupun produk penghimpun dana.

Kegiatan operasional PT Bank SUMUT Cabang Syariah Medan didukung oleh sistem operasional yang disebut OLIB'S Syariah (*Online Integrity Banking System*). Dalam menjalankan operasional perbankan sehari-hari PT Bank SUMUT Cabang Syariah Medan menggunakan sistem operasional perbankan yang menganut pada prinsip syariah.

Pada sistem operasional Bank SUMUT Syariah nasabah kreditur yang menanamkan modalnya akan memperoleh keuntungan bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh bank (bagi nasabah yang menanamkan modalnya dalam bentuk tabungan Marwah). Kemudian dana nasabah terdebit akan disalurkan oleh bank kepada nasabah debitur yang membutuhkan, baik dalam bentuk modal usaha maupun jual beli.

Adapun produk yang ditawarkan Bank SUMUT dalam rangka menghimpun dana nasabah kreditur dan penyaluran dana kepada nasabah debitur adalah sebagai berikut:

a. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

Adapun produk PT Bank SUMUT Cabang Syariah Medan yang bersifat menghimpun dana adalah:

1) Produk Wadiah

a) Tabungan Marwah (*Martabe Wadi'ah*)

Tabungan Marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu merupakan titipan murni yang dengan seizin dari pemilik dana (*Shahibul Maal*). Bank dapat mengelolanya didalam operasional Bank untuk mendukung sektor riil, dengan jaminan bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS) menjamin pengembalian dana dan titipan nasabah sampai dengan jumlah nominal seratus juta.

Adapun keuntungan yang diterima nasabah adalah dapat ditarik setiap saat, dapat dijadikan agunan pembiayaan, keamanan dana dan dalam kondisi tertentu Bank dapat memberikan bonus maupun hadiah lainnya yang besar dan caranya tidak diperjanjikan, melainkan hanya merupakan kebijakan Bank, nasabah dapat menarik dana kapanpun diseluruh kantor Bank SUMUT secara online.

Setiap nasabah yang melakukan pembiayaan, maka harus membuka tabungan Martabe Wadi'ah, untuk kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan.

b) Giro Wadiah

Prinsipnya samaseperti tabungan wadi'ah yang merupakan titipan murni. Diperuntukkan bagi kebutuhan nasabah untuk mendukung kegiatan usaha dalam hal transaksi keuangan. Adapun beberapa ketentuan dan keuntungan produk ini adalah dapat ditarik setiap saat dengan cek dan bilyet giro dan diberi bonus yang jangka waktu dan jumlah tidak dijanjikan serta dijamin keamanannya.

c) Tabungan Makbul

Tabungan Makbul adalah produk tabungan khusus PT Bank SUMUT sebagai sarana penitipan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

2) Produk Mudharabah

a) Tabungan Marhamah (Martabe Bagi Hasil Mudharabah)

Merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *Mudharabah Muthalaqah* yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan Bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana

nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

b) Deposito Ibadah (Deposito Investasi Bagi Hasil Mudharabah)

Prinsipnya sama dengan Tabungan Marhamah, tetapi dana yang disimpan nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama.

b. Produk Penyaluran Dana (*Lending*)

Adapun produk PT Bank SUMUT Cabang Syariah Medan yang bersifat penyaluran dana adalah:

a) Murabahah

1) Transaksi Jual Beli dalam Bentuk Piutang Murabahah

Merupakan akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati diawal dimana Bank menyebutkan harga pembelian dan keuntungan yang diperoleh Bank. Bank dapat mensyaratkan pembeli untuk membayar uang muka (*urbun*). Nasabah membayar kepada Bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga atau pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini terdiri dari:

2) Murabahah Modal Kerja

Murabahah yang digunakan untuk kebutuhan usaha seperti menambah persediaan barang dagangan, bahan baku atau bahan pembantu produksi.

3) Murabahah Investasi

Murabahah yang digunakan untuk kebutuhan investasi seperti membeli rumah untuk disewakan dan membangun tempat usaha atau renovasi tempat usaha.

4) Murabahah Konsumsi

Murabahah yang digunakan untuk membeli barang konsumsi seperti kendaraan atau alat transportasi, membangun atau merenovasi rumah dan alat-alat rumah tangga atau sejenisnya.

5) Murabahah Modal Kerja (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro)

Murabahah tanpa agunan yang digunakan untuk membiayai usaha mikro dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 1.000.000,-

b) Transaksi Bagi Hasil Mudharabah

Transaksi bagi hasil Mudharabah adalah akad kerja sama antara Bank sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan nasabah sebagai pengelola dana (*Mudharib*). Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad. Kerugian dapat menjadi beban Bank atau beban nasabah, sesuai penyebab kerugian yang diatur dalam akad. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah. Mudharabah ini terdiri atas:

1) Mudharabah Modal Kerja

Mudharabah Modal Kerja adalah mudharabah yang dipergunakan untuk kebutuhan usaha atau perdagangan.

2) Mudharabah SPK (Surat Perintah Kerja)

Mudharabah yang dipergunakan untuk kebutuhan proyek, khususnya proyek instansi pemerintahan.

c) Transaksi Bagi Hasil Musyarakah

Transaksi bagi hasil Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan pada awal akad.

Pada dasarnya transaksi bagi hasil Musyarakah sama dengan bagi hasil Mudharabah, yang menjadi perbedaannya adalah keadaan modalnya, yaitu

pada bagi hasil Mudharabah hanya satu pihak yang menyediakan modal secara keseluruhan yang dalam aplikasi perbankan adalah pihak bank (*Shahibul Maal*) sedangkan nasabah (*Mudharib*) bertindak sebagai pihak yang mengelola dana. Sedangkan pada bagi hasil Musyarakah, masing-masing pihak menyediakan dana dan masing-masing pihak sebagai pengelola.

d) Gadai Emas

Gadai Emas Syariah adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbal jasa yang diberikan Bank SUMUT Syariah kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Produk ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan dana mendadak.

e) Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel)

Produk Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) merupakan produk baru yang dimiliki Bank SUMUT Syariah yang diperuntukan oleh pelajar awal anak usia dini yang mana setoran dimulai dari Rp 1.000,-

c. Jasa-Jasa Bank

Pelayanan jasa perbankan yang tersedia pada PT Bank SUMUT Syariah merupakan perwujudan dari komitmen Bank SUMUT untuk memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan nasabah akan jasa perbankan. Adapun jasa-jasa yang ditawarkan sebagai berikut:

a) Kiriman Uang (Transfer)

Merupakan fasilitas untuk melayani kebutuhan nasabah akan jasa transfer ke seluruh Bank di Nusantara secara cepat dan aman. PT Bank SUMUT Cabang Syariah Medan telah *online* ke seluruh jaringan kantor PT Bank SUMUT.

b) Inkaso (Jasa Tagih)

Merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah atas kepastian dan pengurusan penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman.

c) Bank Granasi

Merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bank kepada nasabah yang membutuhkan pinjaman untuk mitra kerja dalam rangka bisnis seperti tender, proyek, pelaksanaan proyek dan sebagainya.

J. Lokasi Bank SUMUT Cabang Syariah Medan

a. Kantor Cabang Utama

Kantor cabang utama beralokasi di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan 20152 Sumatera Utara. Telp (061) 4155100, (061) 4515100. Fax (061) 4574153, (061) 5574151.

b. Kantor Cabang Syariah Medan

PT Bank SUMUT Cabang Syariah Medan yang berada di Jalan Brigjen Katamso Komplek Centerium No. 4 Medan merupakan pindahan dari Bank SUMUT Cabang Syariah S. Parman yang beralamat di Jalan Letjend S. Parman No. 50 A Medan. Telp (061) 4529262 – 45568127. Fax (061) 4526629

K. Daerah Pemasaran Bank SUMUT Cabang Syariah Medan

Daerah pemasaran produk-produk Bank SUMUT Cabang Syariah Medan meliputi Medan dan sekitarnya khususnya dan Sumatera Utara umumnya.

B. Penerapan GOOD CORPORATE GOVERNANCE di Bank Sumut Syariah

Good Corporate Governance adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif dengan prinsip – prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi . Good governance akan terwujud apabila kekuatan yang ada dapat saling mendukung yaitu : 1. Warga dan pihak swasta yang

bertanggungjawab aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan 2. Pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar dan mau melibatkan warga, serta adanya kontrol yang berjalan dengan baik.

Untuk memperoleh data perihal masalah GOOD CORPORATE GOVERNANCE peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan antara lain, wakil pimpinan, pihak audit internal, dan bagian SDM. Adapun hasil wawancara peneliti dengan pak M. Idris selaku wakil pimpinan, ketika ditanya mengenai pelaksanaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE di Bank Sumut Syariah, beliau mengatakan:

“ Pelaksanaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE dilakukan dengan 5 prinsip, yaitu : penerapan pada prinsip *transparansi* dengan cara menyampaikan laporan keuangan ke public (media cetak/ elektronik) dilakukan setiap tahun sehingga para seluruh stakeholder dapat melihat perkembangan perbankan UUS. Lalu pada prinsip *akuntability*, setiap pegawai baik yang berjabatan maupun tidak berjabatan mempunyai beban, wewenang dan tanggung jawab kerja masing – masing, yang termasuk kedalam profil jabatan dan wewenang tugas perusahaan , sehingga tanggungjawab dan wewenang setiap orang sudah terukur. Kemudian, prinsip *Responsibility* dengan adanya kegiatan operasional selain bertujuan ekonomi (dividen) tapi juga menimbang ke dampak sosial dan lingkungan yang akan timbul kemudian, maka diterapkan kegiatan *corporate social responsibility* sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada prinsip independensi dilakukan dengan setiap pegawai khususnya seorang auditor harus bersikap independen tidak dapat dan tidak mudah dipengaruhi karena melaksanakan tugas untuk kepentingan umum. Lalu pada penerapan *fairness* dilakukan dengan melaksanakan kegiatan perbankan secara wajar dan terbuka dimana setiap individu saling mengawasi dan bekerja sama dalam rangka mencapai tujuannya.”

Dengan demikian, dari hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa GOOD CORPORATE GOVERNANCE memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan operasional perbankan. Dimana, GOOD CORPORATE

GOVERNANCE menjadi dasar penilaian terhadap perbankan. Bank yang memiliki penerapan GOOD CORPORATE GOVERNANCE yang baik, mengindikasikan bahwa bank tersebut memiliki kegiatan operasional yang baik, yang akan menjadi nilai tambah dalam menarik minat nasabah untuk bekerjasama dengan pihak bank. Karena dalam melakukan usaha dibidang jasa, sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan dari konsumen ataupun nasabah.

Dalam mewujudkan GOOD CORPORATE GOVERNANCE yang baik, maka diperlukan pihak independen yang mengawasi setiap kegiatan operasional perbankan. Sehingga dalam melakukan kegiatan operasional berlangsung secara efisien.

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai Wakil pimpinan perihal peranan audit internal dalam mewujudkan GOOD CORPORATE GOVERNANCE di Bank Sumut Syariah KC. Medan, beliau mengatakan :

“ Audit internal memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan GOOD CORPORATE GOVERNANCE di Bank Sumut Syariah Medan, karena GOOD CORPORATE GOVERNANCE dapat berjalan karena pengawasan kinerja dari audit internal dan proses pelaksanaan audit internal dilaksanakan oleh divisi pengawasan kantor pusat Bank Sumut 1 kali dalam setahun dan oleh control internal kantor cabang, setiap hari pemeriksaan rutin pengawasan kegiatan cabang ”.

Dari hasil wawancara dengan pihak wakil pimpinan dapat diketahui bahwa Audit internal memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan GOOD CORPORATE GOVERNANCE di Bank Sumut. Proses audit internal dilakukan setiap hari oleh pihak control internal pada masing – masing cabang dan 1 tahun sekali oleh kantor pusat.

Dalam melaksanakan tugasnya, ada beberapa hal yang dinilai oleh pihak auditor internal, beliau mengatakan:

“ Yang dinilai adalah kepatuhan para pegawai dalam menerapkan peraturan perusahaan, ketentuan perusahaan berupa SK dan SE serta SOP”.

Dengan demikian, dari hasil wawancara peneliti dengan pihak audit internal diketahui bahwa kepatuhan para pegawai dalam melaksanakan SK, SE, dan SOP menjadi hal – hal yang dilihat audit internal dalam melakukan proses audit terhadap operasional bank.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak SDM dengan topik, bagaimana Audit Internal dapat memberi manfaat pada GOOD CORPORATE GOVERNANCE, dengan mewawancarai bapak SDM, beliau mengatakan :

“iya, karena dengan adanya audit internal setiap kegiatan karyawan akan selalu dalam pengawasan apabila terjadi human error maka karyawan mendapatkan punishment”

Dengan demikian, dari hasil wawancara peneliti dengan pihak SDM, diketahui bahwa audit internal sangat member manfaat untuk GOOD CORPORATE GOVERNANCE dikarenakan dengan adanya pasal dan ketentuan yang berlaku dan dapat membantu serta meringankan kinerja perbankan karena dengan adanya kerjasama audit internal dan GOOD CORPORATE GOVERNANCE.”

C. Analisis Temuan

Menurut pengamatan penulis, ada beberapa persoalan yang harus dicermati, diantaranya sebagai berikut :

1. Internal Audit adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan di setiap bank, maka dengan adanya Audit Internal laporan keuangan dan lain sebagainya harus dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang terdapat pada pasal dan Undang- undang yang mengatur adanya Internal Audit.
2. Proses Audit Internal di Bank Sumut dilaksanakan oleh Divisi pengawasan kantor pusat PT.Bank Sumut yang dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun oleh control internal kantor cabang setiap hari pemeriksaan rutin

pengawasan kegiatan cabang, serta penyajian data yang tidak akurat dan kurangnya tenaga kerja yang membuat pihak audit internal kewalahan dalam pemeriksaan data-data dan laporan keuangan.

3. Dalam peranan SDM dapat melakukan evaluasi kinerja singkat setiap tiga bulan sekali, akan tetapi penilaian umum dapat dilakukan sekali dalam setahun. Dengan adanya SDM dapat meringankan dan bekerjasama dengan Audit Internal dalam penerapan GOOD CORPORATE GOVERNANCE.

4. Dalam penerapan prinsip – prinsip GOOD CORPORATE GOVERNANCE di Bank Syariah, pihak bank sumut melakukan berbagai macam kebijakan, diantaranya yaitu :

- a. Prinsip Transparency

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

- b. Prinsip Responsibility

Responsibility (Pertanggung Jawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian dan persaingan yang sehat.

- c. Prinsip Independensi

Independency (Kemandirian) adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang

sehat Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

d. Prinsip Akuntability

Accountability (Akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari agency problem (Bentuk Kepentingan Peran).

e. Prinsip Fairness

Fairness (Kesetaraan Dan Kewajaran) dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati, sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil. Fairness menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan.

5. Bank sumut yang sangat berpengaruh terhadap etos kerja sehingga sering mendapatkan Reward dan punishment yang sangat mempengaruhi karena saling berkaitan dengan adanya reward dan punishment akan menjadi dorongan bagi para karyawan untuk memiliki etos kerja yang baik

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Good Corporate Governance adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif dengan prinsip – prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi . ada beberapa prinsip Good Corporate Governance yaitu :

- a. Prinsip Transparency

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

- b. Prinsip Responsibility

Responsibility (Pertanggung Jawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian dan persaingan yang sehat.

c. Prinsip Independensi

Independency (Kemandirian) adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

d. Prinsip Akuntability

Accountability (Akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari agency problem (Bentuk Kepentingan Peran).

e. Prinsip Fairness

Fairness (Kesetaraan Dan Kewajaran) dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati, sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil. Fairness menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan.

2. Kebijakan yang dilakukan oleh SDM

a. prinsip transparansi

dengan membuat laporan keuangan publik

b. responsibility

dengan membuat aturan dan wewenang tugas pegawai serta penilaian kinerja pegawai

c. Akuntability

Dengan memberikan program CSR.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, yang menjadi saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat meneliti internal audit dengan landasan teori lain yang mempengaruhi *Good Corporate Governance* selain landasan teori peranan audit internal yang diteliti oleh peneliti.

2. Bagi Bank Sumut Syariah

Diharapkan memberikan dukungan terhadap para auditor agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, salah satunya dengan mengadakan program pendidikan dan pelatihan bagi Auditor untuk meningkatkan fungsi dan tugasnya sebagai auditor internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Azhari. *Dari Etika ke Spiritualitas Bisnis*. Medan: IAIN Pers. 2014.
- Adrian, Sutedi. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Ares, Al, et.al. *Auditing*. Jakarta: PT. Indeks, 2006.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang : Azkia Publisher. 2009.
- David, R. Fred. *Manajemen Strategis Kosep-Konsep*. Jakarta : PT. INDEKS. 2004.
- Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia. *Booklet Perbankan Indonesia 2012*. Jakarta : Bank Indonesia . 2012.
- Douglas, et.al. *Auditing & Assurance*. Jakarta: Salemba empat. 2006.
- Gondodiyoto, Sanyoto. *Audit Sistem Informasi : Pendekatan CobIT*. Jakarta : Mitra Wacana Media. 2007.
- Huda, Nurul & Edwin Nasution Mustafa . *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Jogiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. 2007
- Masyudi, Muqorobin . *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar*. Universitas Muhammadiyah: Purwokerto. 2014.
- Moleong J. Lexy. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006
- Naja, Daeng . *Legal Audit Operasional Bank*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2006.
- Nuruddin, Amiurdan Rivai Veithzal. *Islamic Business and economic Ethic*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.

S. Alam. *Ekonomi*. Jakarta : Esis. 2006

Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka. 2010 .

Singleton, Hall. *Information Technology Auditing and Assurance*. Jakarta : Salemba Empat. 2007.

Suharsimki, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Sukrisno, Agues. *Auditing Pemeriksaan Akuntansi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004.

Suyatno. Thomas, et.al., *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta : Gramedia. 2007

SR, Bambang Subroto. *Corporate Governance Or Good Corruption Governance*. Jakarta : Elex Media Komputindo. 2005.

Tugiman, Hiro . *Internal Auditing The New Internal Auditing Courtemance*. Yogyakarta : Kanisius. 1997.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT.RajaGrafindo. 2016.

Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Widyaningsih G. Kartasapoetra. *Standar Auditing Internasional*. Jakarta : PT BINA AKSARA. 1988.

Wiley ,John& sons. *Internal auditing THE NEW INTERNAL AUDITING*. Yogyakarta : KANISIUS. 1997.

<https://businessenvironment.wordpress.com/2007/04/30/membangun-tatakelola-perusahaan-menurut-prinsip-prinsip-gcg/> diakses pada tanggal 12 Mei 2017

[http: // www.banksumut.com/ statis-5-sejarah.html](http://www.banksumut.com/statis-5-sejarah.html). Diunduh pada tanggal 4 Mei 2017.

[http: // www.banksumut.com/ statis-2-visidanmisi.html](http://www.banksumut.com/statis-2-visidanmisi.html). Diunduh pada tanggal 4 Mei 2017.

[http: // www.banksumut.com/ statis-34-profil.html](http://www.banksumut.com/statis-34-profil.html). Diunduh pada tanggal 4 Mei 2017

<http://pena.gunadarma.ac.id/penilaian-kesehatan-bank-good-corporate-governance.com> . Di akses tanggal 16 Agustus 2017

<http://antohilya.blogspot.co.id/2011/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2017

http://www.kompasiana.com/imaaceh/pentingnya-auditor-syari-ah-di-perbankan-islam_573e61bf63afbd5c052e1472 di akses pada tanggal 23 Agustus 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS PRIBADI

- 1. Nama : Zulfa Maulidina
- 2. Nim : 26133078
- 3. Tempat/tgl/lahir : Medan, 23 Agustus 1995
- 4. Pekerjaan : Mahasiswa
- 5. Fakultas/Jur/Sem : FEBI/EPS-B /IX
- 6. Alamat : Jl. Cempaka Turi Gg. Cempaka 1, NO.36

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1. Tamatan SD Swasta Melati Berijazah tahun 2007
- 2. Tamatan SMP Swasta Melati Berijazah tahun 2010
- 3. Tamatan SMK Swasta Sinar Husni Berijazah tahun 2013

3. RIWAYAT ORGANISASI

- 1. UIE (Universal Islamic Economic)